

SKRIPSI

**STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA DI KOTA MAKASSAR
(ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)**



OLEH:

FAISAL

E041171501

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA DI KOTA MAKASSAR**

(ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAISAL

E041171501

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA DI KOTA MAKASSAR
(ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)

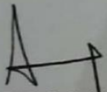
Disusun dan Diajukan Oleh:

FAISAL
E041171501

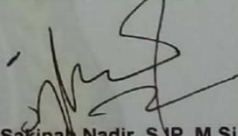
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 03 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D
NIP 197508182008011001

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si
NIP 197912382008122002

Mengetahui
Ketua Departemen
Ilmu Politik




Dr. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi

**STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA DI KOTA MAKASSAR
(ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)**

Oleh:

FAISAL

E041171501

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Rabu 3 Agustus 2022
Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Phil Sukri, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal

Nim : E041171501

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

"STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KOTA MAKASSAR (ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)" Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and '557E9AJX96843586'. The signature is written in a cursive style.

Faisal

ABSTRAK

FAISAL. NIM E041171501. STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KOTA MAKASSAR (ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020). Di Bawah Bimbingan Dr. Phil. Sukri, M.Si Dan Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan Pendidikan politik terhadap masyarakat. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam mendorong partisipasi pemilih pemula serta mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Chandler pada Tahap Penyusunan Strategi, Formulasi dan sasaran jangka Panjang, Pemilihan Tindakan, Alokasi sumber daya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai pendukung informasi, kemudian data tersebut dianalisis.

Dari hasil penelitian ini pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020 dilihat dari beberapa strategi yaitu formulasi dan sasaran jangka Panjang, pemilihan Tindakan, dan alokasi sumber daya. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan walikota Makassar tahun 2020 yaitu, faktor kesadaran politik pemilih pemula dan faktor kandidat. Adapun hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum kota Makassar dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2020 yaitu, peserta sosialisasi tatap muka terbatas, dan tahapan pemutakhiran data pemilih. Serta pemilihan walikota Makassar tahun 2020 diadakan di masa pandemic Covid-19.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemula.

ABSTRACT

FAISAL. NIM E041171501. KPU'S STRATEGY IN ENCOURAGING BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN MAKASSAR CITY (ANALYSIS OF MAKASSAR MAYOR ELECTION 2020). Under the guidance of Dr. Phil. Sukri, M.Si and Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

People in general do not know and understand what their rights and obligations are as the color of the state in political participation. This happens due to the lack of socialization and political education to the community. So that the Makassar City General Election Commission must have a strategy to increase voter participation, especially among novice voters.

This study aims to identify, describe, and explain the strategy of the Makassar City General Election Commission in encouraging the participation of novice voters and to find out the driving and inhibiting factors faced by the Makassar City General Election Commission in encouraging the participation of novice voters in the 2020 Mayoral Election in Makassar City. In this study, the author uses the Chandler approach at the Strategy Development Stage, Formulation and Long-Term Goals, Action Selection, Resource Allocation. The method used in this research is descriptive research type and qualitative research type with data collection through interviews, observation, and documentation as supporting information, then the data is analyzed.

From the results of this study, the implementation of the General Election Commission's socialization program in increasing beginner voter participation in the 2020 Makassar mayoral election was seen from several strategies, namely formulation and long-term goals, selection of actions, and allocation of resources. The supporting factors in the implementation of the Makassar mayoral election in 2020 are the political awareness factor of novice voters and the candidate factor. The obstacles faced by the Makassar City General Election Commission in the 2020 Makassar mayoral election, namely, limited face-to-face socialization participants, and the stages of updating voter data. And the 2020 Makassar mayoral election was held during the Covid-19 pandemic.

Keywords: General Election Commission, Beginner Voters.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Kpu Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota Makassar (Analisa Terhadap Pemilihan Walikota Makassar 2020)”. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis curahkan pada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Politik, pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan tulisan ini dan kiranya dppapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya, selain itu pada kesempatan ini izikan penulis mengucapkan terima kasih kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis atas segala cinta, kasih sayangnya yang tulus, yang senantiasa memberikan doa dan menjadi penyemangat serta pengorbanan yang tak dapat tergantikan dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Skripsi ini dapat diselesaikan karena banyaknya dukungan dan batuan yang diterima oleh penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak pembimbing Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si dan Ibu Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis terima kasih atas kesediaan dalam menghadiri sidang skripsi penulis dan memberikan banyak masukan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Prof. Armin, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D; Dr. Phill; Sukri, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Andi Naharuddin, S.IP, M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Zuhajar, S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, M.A; Ummi Suci

Fathiah B, S.IP, M.Si, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas pkuliah-kuliah inspiratifnya.

7. Seluruh Staff Pegawai Departemen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar beserta jajarannya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar Himapol Fisip Unhas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama penulis kuliah.
10. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Politik Dekrit17, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, waktu dan kenangan selama kuliah.
11. Terima kasih juga kepada informan atas waktu telah diluangkan dan keterbukaan kepada penulis, sehingga memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Sekali lagi terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, dukungan dan perhatian serta kerjasamanya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 25 Agustus 2022

Faisal

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Akademik.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Literature Review.....	13
2.2 Tinjauan Teoritis	17
2.2.1 Teori Strategi.....	17
2.2.2 Tujuan Strategi	20
2.2.3 Tingkatan Strategi	21
2.2.4 Perencanaan Strategi.....	22
2.3 Konsep Partisipasi Politik	24

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik	24
2.3.2 Tipe Partisipasi Politik	26
2. 4 Konsep Sosialisasi Politik	28
2.4.1 Pengertian Sosialisasi Politik.....	28
2.4.2 Tujuan Sosialisasi Politik.....	30
2.4.3 Agen Sosialisasi Politik.....	32
2. 5 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	33
2. 6 Pemilih Pemula	35
2.6.1 Karakteristik Pemilih Pemula	38
2. 7 Kerangka Berpikir	41
2.7.1 Bagan Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3. 1 Dasar, Tipe dan Jenis Penelitian	43
3. 2 Lokasi Penelitian.....	45
3. 3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3. 4 Teknik Pengumpulan Data	46
3. 5 Informan.....	47
3. 6 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	51
4.1 Kota Makassar.....	52
4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020.....	54
4.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	57
4.3.1 Visi Misi KPU Kota Makassar	59
4.3.2 Tugas dan Kewenangan KPU Kota Makassar	60

4.4 Jumlah Penduduk Kota Makassar	65
4.5 Data perbandingan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Pemula pada Pilwali 2018 dengan 2020.....	66
4.6 Jumlah Daftar Data Pemilih Kota Makassar.....	68
4.7 Jumlah Daftar Pengguna Hak Pilih.....	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang	74
5.2 Pemilihan Tindakan.....	78
5.2.1 Melakukan KPU Goes To School/Goes To Campus	78
5.2.2 Menggandeng Dua Influencer Kenamaan Makassar Tumming- Abu Dalam Proses Sosialisasi.....	84
5.2.3 Sosialisasi Eleketronik Rumah Pintar Pemilu	86
5.2.4 Pengoptimalan Media.....	89
5.3 Alokasi Sumber Daya	97
5.3.1 Memaksimalkan Rantai Sumber Daya Manusia.....	98
5.3.2 Penguatan SDM Tingkat Ad Hoc.....	101
5.4 Faktor Pendukung KPU dalam mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020	103
5.5 Faktor Yang Menghambat KPU Kota Makassar Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilwalkot Makassar Tahun 2020	106
BAB VI PENUTUP	110
6.1 Kesimpulan.....	110
6.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan KPU Kota Makassar	47
Tabel 4.1	Partisipasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020	56
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar	65
Tabel 4.3	Data Perbandingan DPT Pemilih Pemula 2018/2020	67
Tabel 4.4	Jumlah Data Pemilih Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar	68
Tabel 4.5	Jumlah Daftar Pengguna Hak Pilih Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar	70

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1	Kota Makassar	52
Gambar 4.3	Sktuktur KPU Kota Makassar	64
Gambar 5.1	Goes to Campus	81
Gambar 5.2	Goes to School	82
Gambar 5.3	Sosialisasi Bersama Tumming-Abu	86
Gambar 5.4	Website E-RPP	88
Gambar 5.5	Instagram KPU Kota Makassar	90
Gambar 5.6	Youtube KPU Kota Makassar	91
Gambar 5.7	Sosialisasi Media Massa	93
Gambar 5.8	Sosialisasi Relawan Demokrasi	96
Gambar 5.9	Sosialisasi Memaksimalkan SDM	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.¹

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 367.

(*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Adapun menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Asumsinya bahwa orang yang paling mengetahui tentang keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu tersebut. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.²

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemerintahan yang ada pada Negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka.³

Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai

² Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2016), Hal. 15.

³ Rudy Hartono., "*Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*", Fakultas Ilmu Sosial, UNY, 2016, Hal. 4.

pendidikan politik yang seperti ini. Lewat pendidikan masyarakat yang seharusnya dapat memecahkan permasalahan hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari mendatang.

Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah Negara tersebut. Oleh karena itu, Negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan tugas KPU dalam Undang- undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berakaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU kota Makassar sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu

yang optimal, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu di daerahnya. Tetapi juga Komisi Pemilihan Umum harus tetap menjunjung tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa di terima oleh setiap calon pemimpin.⁴

Sehingga KPU kota Makassar harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik . strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan politik harusnya membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik guna meningkatkan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu di kembangkan dan di aktualkan, juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang wajar supaya mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masyarakat hanya perlu dibimbing dan diarahkan agar supaya mereka mempunyai keinginan untuk turut serta dalam aktivitas politik.⁵

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, di sadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 2010).

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh

⁵ Rudy Hartono., *"Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat"*, Fakultas Ilmu Sosial, UNY, 2016, Hal. 4-5.

perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa di bandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian,1978).

Dalam praktiknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002) yaitu : keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio.⁶

Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Perilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Dalam penelitian Jennings dan Nieni (1990) terungkap bahwa anak-anak pada usia SMA cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orang tua mereka. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya mudah terpengaruh dengan teman sebayanya. *Peer group* akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting

⁶ Muhammad Adeputera Hemas.,*"Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal"*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, 2019, Hal. 1-2.

dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan, Menurut Ahmadi (dalam Mukti Sitompul, 2005).⁷

Saat ini usia pelajar disekolah menengah atas (SMA) kelas sebelas dan dua belas yang kisaran umurnya berkisar 17-18 tahun sudah masuk kategori pemilih pemula dalam pemilihan walikota sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang pasal 56 ayat 1 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.⁸ Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi sangatlah penting sebab pemimpin yang terpilih dalam pesta demokrasi sangat menentukan nasib rakyat di daerah terpilihnya.

Maka dari itu sosialisasi politik menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya partisipasi politik dalam kelompok masyarakat. Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kota Makassar merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan Walikota Makassar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat daftar pemilih pemula di Kota Makassar pada pemilihan Walikota & Wakil Walikota pada Tahun

⁷ *Ibid.*, Hal 2.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Pasal 56 Ayat 1.

2020 mencapai 42.460 orang, dengan rincian pemilih laki-laki 22.026 dan perempuan 20.434. Mereka ini golongan yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan umum atau Pilkada, atau penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan atau warga Indonesia,”⁹.

Pemilih pemula dijadikan sasaran program pendidikan politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi misi, rekam jejak dan program-program yang ditawarkan. (c) untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkena isu residu politik, seperti *money politic*, dan kampanye hitam.¹⁰

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul penelitian ini, sebagai berikut. *Pertama*, terkait pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Walikota atau biasa disebut dengan Pilwalkot serentak yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Menjadi

⁹ Politik.Djournalist.com, “Pemilih Pemula Pilwalkot Makassar Capai 42.460 Orang”, Diakses Melalui <https://www.google.com/amp/politik.djournalist.com/2020/11/16/pemilih-pemula-pilwalkot-makassar-capai-42-460-orang/amp/>. Pada Hari Rabu, Tanggal 08-03-2021.

¹⁰ Muhammad Adeputera Hemas., “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, 2019, Hal. 5.

permasalahan pada Pemilihan Walikota 2020 karena diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial atau *social distancing* dan pembatasan jarak fisik atau *physical distancing*. Kedua, penyelenggaraan Pilwalkot syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak (Hergianasari, 2016). Ketiga, permasalahan yang muncul yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilwalkot 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilwalkot yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye, dan pemungutan suara.

Melihat kondisi dan keadaan di tengah pandemi covid-19 seperti ini tentunya ini merupakan sebuah tantangan yang baru bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi khususnya para pemilih pemula.

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diatas penulis bertujuan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai strategi KPU dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KOTA MAKASSAR (ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020)”**

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi KPU Kota Makassar dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Makassar ?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Makassar ?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menjelaskan strategi KPU Kota Makassar dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Makassar.
2. Untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi KPU Kota Makassar dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Makassar.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan akademik dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat dari segi akademik adalah dapat membantu civitas akademika yang ingin mengetahui strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya mengetahui strategi sosialisasi KPU untuk mendorong partisipasi pemilih pemula di kota Makassar. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum tinjauan pustaka adalah kerangka konseptual dalam penulisan, merupakan dasar berpijak dari sisi kajian teori. Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Penulis akan mempelajari konsep dan teori ini untuk menganalisis tentang strategi sosialisasi dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut :

2. 1 Literature Review

Salah satu cara penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan *literature review* terkait dengan tema yang di teliti maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Meskipun penelitian tentang strategi sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula sudah banyak yang telah melakukan penelitian, namun untuk menghindari kesamaan atas penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut merupakan *literature review* berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Cherlinda Hestiane Cahyani dengan judul penelitian "*Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik*

Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan peranan Kesbangpol Depok dalam memberikan sosialisasi politik kepada pemilih pemula. Penelitian ini menganalisa tentang sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk masyarakat Depok. *Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) : kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi politik Kesbangpol berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula di Depok yaitu sebesar 43,6%. Menurut para peserta sosialisasi, Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dengan sangat baik dan dilakukan dengan perencanaan yang matang.*¹¹

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Lestari dengan judul penelitian yaitu “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang dan faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik. *Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan*

¹¹ Cherlinda Hestiane Cahyani, “*Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Skripsi.

dari orang-orang atau perilaku yang diamati. *Hasil penelitian* menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang KPU bekerja sama dengan relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kinerja meskipun tidak dilakukan secara rutin, sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat di antaranya anak SMA, Mahasiswa dan Masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet.¹²

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Melda Oktaviana dengan judul penelitian "*Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Studi Kasus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019)*". Tujuan *penelitian* untuk mengetahui bagaimana kpu kota mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi politik terhadap partisipasi pemilih disabilitas. *Jenis penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendikripsikan gambaran yang nyata

¹² Dewi Sri Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan bupati Dan Wakil Bupati tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang", Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, Skripsi.

tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. *Hasil penelitian* yang diketahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilihat dari 3 aspek yaitu Formulasi dan sasaran jangka panjang, Pemilihan tindakan, dan Keterbatasan sumber daya. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Mataram sudah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih sangat kurang.¹³

Berdasarkan *literature review* di atas menunjukkan adanya kesamaan tujuan yaitu untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya.

¹³ Melda Oktaviana, "*Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Studi Kasus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019)*", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, Skripsi.

2. 2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Strategi

Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga KPU perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Gleko dkk, 2017).¹⁴ Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu, 2015).¹⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Arifin menurut Reksohadiprodo (2010:41) strategi merupakan pondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen pencapaian tujuan. Strategi juga merupakan rencana menyatu komprehensif dan terpadu yang

¹⁴ Gleko, Petrus, dkk, "*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 6, No 1, 2017, Hal. 38.

¹⁵ Salusu J, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta:Grasindo, 2015), Hal. 64.

mengkaitkan keunggulan strategi dengan kesempatan dari ancaman yang datang dari luar.¹⁶

Berbeda dengan Effendi (2016) strategi merupakan perencanaan atau *planning* dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional. Sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.¹⁷

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal. Strategi ini juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pengembangan dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan (Triciptono, 2006:3).¹⁸

Dalam rangka mewujudkan sasaran tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut Koten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi terdiri dari beberapa tipe :

¹⁶ Agung Nugraha, "*Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kerinci (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019)*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2018, Hal. 33

¹⁷ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016), Hal. 32

¹⁸ *Ibid.* Hal 31-32.

1. Strategi organisasi (*strategy corporate*), strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
2. Strategi program (*program strategy*), strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.
3. Strategi pendukung sumber daya (*resources support strategy*), strategi sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. Strategi kelembagaan (*institutional strategy*), fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.¹⁹

Pengertian strategi mencerminkan bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan gerakan, tetapi juga posisi yang dituju, tindakan dan kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang

¹⁹ *Ibid.*, Hal 34.

telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan (Agung Nugroho, 2018).²⁰

Adapun strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk membentuk dan menciptakan pelaksanaan demokrasi yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga pemilu atau dalam hal ini pilkada dapat berjalan dengan baik dikarenakan pemahaman dan kesadaran yang seseorang miliki akan pentingnya demokrasi yang sesuai dengan asas-asas Pancasila. Mengingat secara umum pemahaman pemilih pemula masih dianggap belum rasional dan mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka segmen ini dianggap penting untuk diberikan pemahaman dan kesadaran agar menjadi pemilih yang cerdas karena secara kuantitas jumlah pemilih pemula terbilang cukup banyak.

2.2.2 Tujuan Strategi

Menurut Bambang Hariadi (2005), perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu :

- a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan guna tercapainya tujuan bersama.

²⁰ Agung Nugraha, *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kerinci (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019)”*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2018, Hal. 33.

- b. Melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan *key success factors* dari strategi yang sudah di buat pada tahap analisis.
- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. Memilih strategi yang sesuai dengan mencapainya tujuan jangka panjang dan pendek.²¹

2.2.3 Tingkatan Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Wheelen dan Hunger (1990) menjelaskan adanya tiga tingkatan strategi, keseluruhannya disebut *Enterprise Strategy, Corporate Strategy, Business Strategy*, sebagai berikut :

1. Enterprise Strategy

Enterprise strategi yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya setiap organisasi berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol.

²¹ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Jakarta:Bayumedia Publishing, 2005), Hal. 20.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, jadi sering disebut Strategi meliputi bidang yang berkaitan dengan organisasi.

3. *Business Strategy*

Menjelaskan bagaimana merebut pasaran/harga pasar di tengah masyarakat publik.²²

2.2.4 Perencanaan Strategi

Chandler (dalam Salusu 2015:64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencanaan strategi yang perlu diperhatikan :

1. Formulasi dan sasaan jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya :

²² Dewi Sri Lestari, “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, Hal. 10.

1. Sosialisasi pemilihan umum kepada segmen pemilih pemula, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas jumlah pemilih pemula terbilang cukup banyak.

2. Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilih mereka dengan bijak, melalui dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

3. Alokasi Sumber Daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.²³

2. 3 Konsep Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sebetulnya sangat sederhana kegiatan ini dapat dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) serta *juerdil* (jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas pemilu tersebut bisa terpenuhi. Bila asas *luber* dan *juerdil* ini bisa berjalan dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaian tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014).²⁴

²³ *Ibid.*, Hal 11-12

²⁴ Arifin Supriyono, *Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia* (Perludem, 2014), Hal. 47.

Merujuk pendapat (Supriyono, 2014) keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akan sangat berpengaruh terhadap model dan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa Negara kearah yang lebih baik. ²⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Kumoroto dalam Erfiza (2012:151) Mengatakan bahwa partisipasi merupakan berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya.

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas (Gradien 2012:52). Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin

²⁵ *Ibid*,. Hal 39.

kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan Negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (Ariani 2013:45).²⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan.

2.3.2 Tipe Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2007) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam yaitu :

1. Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang

²⁶ Melda Oktaviana, "*Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas "(Studi Kasus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019)"*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, Hal. 40.

memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.

2. Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militan-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.
3. Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersalahkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).
4. Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang yang di keluarkan atau dengan

kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif atau tertekan (apatis).²⁷

2. 4 Konsep Sosialisasi Politik

2.4.1 Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.²⁸ Dalam pengertian tersebut terlihat bahwasannya sosialisasi merupakan kegiatan yang melibatkan proses penyampaian suatu nilai-nilai ataupun kultur kepada masyarakat.

Sedangkan definisi lengkapnya mengenai sosialisasi menurut Ramlan Surbakti sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik²⁹. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada.³⁰

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2007), Hal. 144.

²⁸ Sosialisasi Menurut KBBI. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/sosialisasi>. Pada Hari Rabu. 26 Mei 2021.

²⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1999), Hal. 117.

³⁰ Dansar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), Hal. 154.